

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN TIONGKOK DENGAN VENEZUELA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tentang sejarah kebangkitan Tiongkok yang menjadikan Tiongkok sebagai negara yang dapat menyaingi Amerika Serikat, melalui gagasan OBOR Xi Jinping, lalu munculnya China-CELAC Forum, dilanjutkan dengan dinamika hubungan yang terjalin antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Venezuela meliputi bagaimana hubungan bilateral antara keduanya terjalin, dilanjutkan dengan hubungan bilateral bidang ekonomi, lalu menjelaskan kedekatan kedua negara dengan keikutsertaannya dalam organisasi internasional yang sama.

A. Kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan negara yang terletak di Asia Timur dan ber-ibukota di Beijing. Berdasarkan laporan data World Bank pada tahun 2017 jumlah penduduk Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 1,435,642,272 miliar jiwa (United Nations Population Division, 2019). Selain memiliki jumlah penduduk terbanyak, Tiongkok juga termasuk kedalam negara terluas ketiga dengan luas 9,326,410 km² yang terbagi kedalam 22 provinsi (Listofcountriesoftheworld.com, 2018).

Lahirnya Republik Rakyat Tiongkok diprakarsai oleh Mao Zedong pada 1 Oktober 1949 dan menjadi presiden pertama Republik Rakyat Tiongkok. Berbagai kebijakan baru muncul semasa pemerintahan Mao Zedong, beberapa diantaranya mengacu kepada gaya Soviet yang justru menimbulkan kontra terutama dari kaum petani. Lompatan Jauh Kedepan kemudian diluncurkan pada tahun 1957 ialah mengelompokkan banyak orang ke dalam beberapa bidang yang akan membangun infrastruktur pertanian skala besar dan mengembangkan industri pedesaan yang berorientasi pada kebutuhan lokal serta diikuti dengan desentralisasi. Akan tetapi kebijakan ini berakhir pada

tahun 1962 dan digantikan dengan Revolusi Kebudayaan pada tahun 1962-1965 yang bertujuan untuk mengganti kerugian para petani yang gagal panen di tahun 1962 . mengakibatkan Tiongkok dalam krisis ekonomi (Ming, 2008).

Setelah Mao meninggal dunia pada tanggal September 1976, kepemimpinan Tiongkok digantikan oleh Deng Xiaoping, dengan reformasi Tiongkok yang dicanangkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, melalui program 'Reformasi dan Keterbukaan' (*Gaige Kaifang*). Reformasi ini membawa Tiongkok kedalam sistem ekonomi baru dengan menggabungkan sistem pasar kapitalis kedalam ekonomi sosialis (Liu, 2004)

Sejak reformasi ekonomi yang diprakarsai Deng Xiaoping diterapkan, arah tujuan Tiongkok ialah untuk melakukan modernisasi masyarakat sosialis. Berkat reformasi, Deng membawa Tiongkok ke ranah global dan ekonomi Tiongkok terbuka untuk negara manapun. Modernisasi telah membuat Tiongkok menjalin berbagai hubungan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara dan ikut serta dalam berbagai organisasi internasional. Keterbukaan ekonomi Tiongkok menimbulkan kerjasama ekonomi yang dapat berbentuk hubungan ekspor-impor atau kerjasama membentuk sebuah investasi (Ferdinand, 2016).

Tiongkok dan Taiwan yang sebelumnya berseteru mulai menjalin kerjasama dan melakukan investasi. Hongkong yang sebelumnya merupakan bekas kekuasaan Inggris menjadi zona ekonomi spesial. Kebijakan RRT dalam menerapkan One Country Two System dimana RRT sebagai negara Komunis memiliki kebijakan khusus untuk Hongkong agar tetap menggunakan sistem liberal kapitalis disamping sistem liberal sosialis yang diterapkan di Tiongkok (Jacques, 2009).

Keterbukaan ekonomi Tiongkok telah membawa Tiongkok kedalam ranah baru. Sekarang,

Tiongkok perlahan mulai menjadi negara yang akan menyaingi Amerika Serikat. Hal ini terbukti ketika di tahun 90-an tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 10%. Peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian yang berbasis kapitalis dengan karakteristik Tiongkok, telah memunculkan ide reformasi pasar melalui kepemilikan semu-swasta yaitu Reformasi perusahaan milik negara. Perusahaan Negara (State-Owned Enterprise/SOE) memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian Tiongkok dan pemerintah juga memberi dukungan penuh secara politik dan finansial (Cipto, 2018).

Pentingnya kemunculan dari kelas menengah Tiongkok yang cepat dan pertumbuhan eksplosif, telah menstimulasi permintaan domestik negara. Hingga taraf tertentu Tiongkok saat ini sudah menjadi salah satu pasar kelas menengah utama dunia. Perhitungan diatas menggabungkan seluruh indikator kelas menengah tahun 2011 dalam hal pekerjaan, pendapatan, konsumsi, dan identifikasi diri terdiri 23 persen sebanding dengan 243 juta dari total populasi Tiongkok, telah naik dari 15 persen pada tahun 2001. Sosiolog terkenal Lu Xueyi memperkirakan bahwa kelas menengah Tiongkok akan tumbuh sebesar 1 persen setiap tahunnya (Hu, 2011).

Keberhasilan Tiongkok dalam ekonomi global banyak membuka jalan bagi para negara-negara dunia untuk bekerja-sama atau berinvestasi. Strategi Tiongkok dalam *win-win solution* agar kedua negara tetap mendapatkan manfaat dari kerjasama atau investasi yang dilakukan menjadi alternatif baru kepada terutama bagi negara berkembang. Selain itu, Tiongkok juga memberikan bantuan, tenaga ahli, dan saran kepada negara-negara berkembang lainnya. Pendekatan ini kemungkinan besar memenangkan lebih banyak relasi kepada Tiongkok dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang (Moak & Lee, 2015).

B. One Belt One Road (OBOR) sebagai Perwujudan The Chinese Dream

Terpilihnya Xi Jinping pada tahun 2013 lalu sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok membawa dampak baik bagi kemajuan Tiongkok. Melalui strategi pembangunan ekonomi yang digagas oleh Xi Jinping pada 7 September 2013 di Kazakhstan yang terdiri dari proyek-proyek transportasi dengan tujuan untuk menciptakan 'sabuk ekonomi' atau koridor, yaitu *One Belt One Road (OBOR) Initiative* (Ferdinand, 2016). Gagasan ini bertujuan untuk memperkuat perdagangan, infrastruktur, dan investasi yang menghubungkan Tiongkok dengan Mongolia, Asia Tengah, Rusia, Iran, Turki, Balkan dan Eropa timur, dan akhirnya Jerman dan Belanda. Inisiatif OBOR ini biasanya berbentuk investasi infrastruktur, dimana Tiongkok memberikan pinjaman dana kepada negara-negara yang dilalui untuk membangun jalur kereta api, jalan raya, pelabuhan, jembatan, dan bandara (Lee, 2019).

Belt and Road Initiative (BRI) ini menjadi diplomasi ekonomi Tiongkok agar negara-negara dapat dengan mudah melakukan kerjasama dan investasi dengan Tiongkok serta negara tersebut juga dapat meningkatkan infrastrukturnya. Dalam pidatonya di Kazakhstan, Xi Jinping mengungkapkan bahwa Silk Road Economic Belt ini terdiri dari dua macam yaitu *The Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road* (Jackson & Shepotylo, 2018). Seperti sebelumnya, Xi Jinping membuat gagasan BRI ini ialah untuk mewujudkan “*The Chinese Dream*”, yakni terbentuknya Tiongkok sebagai negara sosialis yang kuat dan makmur. Selain itu, untuk mewujudkan *The Chinese Dream* tatanan dunia internasional haruslah stabil dan dalam keadaan damai. Sehingga impian rakyat Tiongkok dan impian orang lain orang-orang di seluruh dunia terkait erat (Escobar, 2017).

"Impian China" atau *The Chinese Dream* dipelopori oleh Li Junru dan mulai menyebar pada pemerintahan Hu Jintao pada awal 2000-an. Ide yang digagas oleh Wakil pemimpin Sekolah Partai Pusat Partai Komunis Tiongkok (PKC), Li akan diterapkan di Tiongkok untuk menciptakan masyarakat harmonis (Mendez, 2018). Kala itu Tiongkok membutuhkan gagasan baru untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat Tiongkok ketika Reformasi dan Keterbukaan mulai membuahkan hasil dalam meningkatkan perekonomian kelas bawah. Masyarakat Tiongkok berhak mewujudkan impiannya akan industrialisasi dan modernisasi. Partai Komunis Tiongkok (PKC) yang mana adalah satu-satunya partai di Tiongkok turut berperan dalam mencapai impian tersebut (Ferdinand, 2016).

Xi Jinping mengungkapkan bahwa *Chinese Dream* berbeda dengan *American Dream*. Namun, "Impian Tiongkok" tidak se-individualistis seperti "Impian Amerika", yang menekankan pencapaian keberhasilan individu melalui kerja keras. Impian Tiongkok dari *the great rejuvenating* bangsa Tiongkok adalah impian bersama. Pemerintah harus menyadarinya dan rakyat sangat bergantung pada pemerintah, oleh sebab itu pemerintah harus terus-menerus membawa manfaat kepada rakyatnya. Pemerintah Tiongkok mendorong masyarakatnya untuk memiliki atau ikut serta dalam SOE (*State Own Enterprise*). Terkait dengan *Belt and Road Initiative*, selain pemerintah dan PCC, SOE juga turut membantu tercapainya OBOR melalui investasi dalam hal pembangunan infrastruktur (Tao, 2015).

Perdana Menteri Li Keqiang mengumumkan rencana untuk 'Jalur Sutra Maritim' yang menghubungkan Cina tenggara dengan Asia Tenggara, Bangladesh, India, Teluk Persia dan Mediterania, yang akhirnya berakhir di Jerman dan Belanda. Kedua proyek bersama-sama terdiri dari serangkaian elemen

yang tumpang tindih rute kereta api lintas benua, jalan raya, fasilitas pelabuhan, dan jaringan pipa energi yang ditingkatkan dan dikembangkan. OBOR berpotensi melibatkan lebih dari 60 negara dengan populasi gabungan lebih dari 4 miliar orang, yang pasarnya saat ini menyumbang sekitar sepertiga dari PDB global (Ferdinand, 2016).

BRI Tiongkok sekarang mulai melirik negara-negara Amerika Latin untuk diajak kerjasama dan tergabung dalam BRI dijalar *Silk Maritim Road*. Negara-negara seperti Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Peru, dan Venezuela adalah calon member yang ideal menurut *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) tapi mereka juga harus menyelesaikan prosedur untuk mendapatkan kedudukan dan berkontribusi kepada AIIB. Negara LAC yang bergabung pertama ialah Panama pada tahun 2017 dan diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berisikan bahwa kawasan Amerika Latin dan Karibia bergabung BRI. Langkah pertama yang dilakukan Tiongkok mewujudkan BRI di Panama yaitu penandatanganan proyek perluasan Kanal Panama dan dilanjutkan penandatanganan proyek kereta api yang menghubungkan Panama dengan Chiriqui pada bulan desember 2017. Negara kedua yang bergabung ialah Trinidad dan Tobago dan diikuti oleh Bolivia pada Juni 2018 dan Guyana, Uruguay, Antigua dan Barbuda, Venezuela, Kosta Rika, Dominika, Grenada, Suriname, Chile, dan Republik Dominika pada bulan Agustus. Lalu disusul oleh Kuba, Ekuador, Argentina, Barbados, dan Peru dua bulan kemudian (Sáez, 2019).

C. China-CELAC Forum

China-CELAC Forum/CCF adalah sebuah organisasi yang di dirikan oleh Tiongkok dan 33 Negara Amerika Latin dan Karibia pada 17 Juli 2014 di Brasillia. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Tiongkok dengan Negara Amerika Latin dan Karibia (*LAC/Latin America and Carribean*)

ke tahap yang lebih tinggi (Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2018). Baik Tiongkok maupun negara LAC telah mencapai suatu hubungan yang sama-sama memberikan manfaat lebih dari sekedar hubungan ekonomi. Adanya peningkatan dari hubungan politik, investasi, pertukaran sains, teknologi, budaya, dan pendidikan juga melatarbelakangi *China-CELAC Forum* ini agar hubungan keduanya bukan sekedar hubungan multilateral juga keranah hubungan bilateral (Declaración Especial sobre el establecimiento del Foro China-CELAC, 2014).

CELAC berasal dari kata *Community of Latin American and Caribbean States* (Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia) yang mencakup 33 anggota negara bagian CELAC: Antigua dan Barbuda, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Republik Dominika, Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts dan Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad dan Tobago, Uruguay, dan Venezuela.

Forum ini dibentuk atas keinginan Xi Jinping setelah terpilih menjadi presiden Tiongkok untuk membuka dan meningkatkan kerjasama antara Tiongkok dengan Amerika Latin dan Karibia. Xi Jinping dalam pidatonya pada Pertemuan China-CELAC Forum Pertama mengatakan bahwa Tiongkok dan negara LAC memiliki kesamaan, yaitu sama-sama negara berkembang yang dapat bermimpi untuk memajukan negaranya, membangun perdamaian dan menjaga stabilitas (Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2015).

Berdasarkan hasil pertemuan pertama CCF telah merilis tiga dokumen, yaitu *Beijing Declaration of the First Ministerial Meeting of China-CELAC*

Forum, China-Latin American and Caribbean Countries Cooperation Plan (2015-2019), dan *the Institutional Arrangements and Operating Rules of CELAC-China Forum*, serta memutuskan pertemuan kedua akan diadakan di Chile pada Januari 2018.

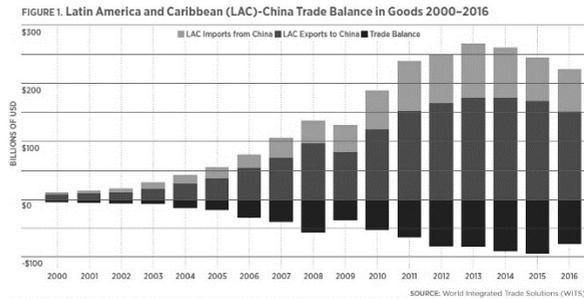
Ketiga dokumen tersebut memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Dalam Dokumen *Beijing Declaration of the First Ministerial Meeting of China-CELAC Forum* berisikan bahwa hubungan yang komprehensif antara Tiongkok dengan LAC dapat terjalin jika keduanya mematuhi prinsip kerja sama dengan baik. Prinsip kerjasama yaitu prinsip panduan untuk memperdalam kerja sama kedua belah pihak, seperti, rasa hormat, kesetaraan, pluralitas, saling menguntungkan (*win-win solutions*), keterbukaan, inklusifitas dan non-kondisionalitas. Selanjutnya, dalam dokumen *the China-Latin American and Caribbean Countries Cooperation Plan (2015-2019)* setelah memahami prinsip kerjasama, terdapat beberapa bidang-bidang khusus yang akan diprioritaskan untuk kerjasama antara Tiongkok dengan negara LAC dalam lima tahun kedepannya. Bidang-bidang khusus tersebut mencakup 13 bidang politik dan keamanan yaitu urusan luar negeri, bidang ekonomi yaitu perdagangan termasuk investasi, dan keuangan, infrastruktur dan transportasi, sumber daya dan energi, pertanian, industri, mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi, kedirgantaraan dan penerbangan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (*knowledge transfer*), budaya dan olahraga, bidang pers, media dan publikasi, bidang pariwisata, perlindungan lingkungan dan manajemen risiko dan pengurangan, pengentasan kemiskinan dan kesehatan, dan persahabatan orang-ke-orang. Dan dokumen penting terakhir *the Institutional Arrangements and Operating Rules of CELAC-China Forum* membahas mekanisme kerjasama yang menawarkan jaminan konstitusional. (Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2018).

Keberhasilan ekonomi Tiongkok telah membawa gelombang kehadiran Tiongkok di seluruh dunia termasuk Amerika Latin. Investasi Tiongkok di Amerika Latin berkembang pesat pada dekade 1990-an dan tumbuh lebih jauh di abad baru. Keputusan Tiongkok untuk berinvestasi di benua itu muncul dari sejumlah faktor, termasuk keinginannya untuk mengamankan bahan baku, makanan, dan memperluas pasar ekspor Tiongkok (Ríos, 2013).

Hubungan Tiongkok dengan Amerika Latin adalah produk dari perkembangan domestik di Tiongkok sejak reformasi dimulai pada akhir 1970-an. Tiongkok telah meningkatkan pangsa PDB globalnya dari kurang dari 2 persen pada awal 1980-an menjadi lebih dari 12 persen sejak 2013, melampaui ekonomi AS sebagai kekuatan ekonomi dunia berdasarkan paritas daya beli. Dengan itu, Tiongkok bergeser dari menjadi pabrik global yang dibangun di atas tenaga kerja murah menjadi pemain utama dalam rantai komoditas yang semakin canggih (Jenkins, 2010).

Kemajuan ekonomi Tiongkok yang cepat, ditambah dengan strategi pertumbuhan yang intensif akan energi dan modal, dan banyaknya sumber daya alam Amerika Latin, telah memicu pertumbuhan ekspor negara LAC. Untuk sebaliknya, impor manufaktur dari Tiongkok meningkat secara signifikan, yang awalnya hanya melibatkan manufaktur kelas rendah, sekarang berkembang menjadi manufaktur yang lebih canggih. Produk primer dan manufaktur yang berbasis sumber daya didorong oleh mineral dan logam, produk pertanian, dan bahan bakar. Produk-produk tersebut menyumbang lebih dari 90 persen ekspor Amerika Latin ke Tiongkok. Di sisi lain, manufaktur mendominasi penjualan Tiongkok ke wilayah tersebut, dipimpin oleh mesin dan peralatan listrik, tekstil, bahan kimia, logam, dan lainnya.

Figure 2.1 Latin America and Caribbean (LAC)-China Trade Balance in Goods 2000-2016



Sumber: Latin America – China Trade and Investment Amid Global Tensions : A Need To Upgrade and Diversify (Gonzalez, 2018)

Enam dari mitra dagang utama China di Amerika Latin dan Karibia berada di Amerika Selatan yang kaya sumber daya seperti Brasil, Argentina, Chili, Peru, Kolombia, dan Venezuela. Ekspor negara-negara ini ke Tiongkok terkonsentrasi di empat produk, yang mewakili 75 persen ekspor Amerika Latin ke negara Asia: tembaga, kedelai, minyak mentah, dan bijih besi (Gonzalez, 2018).

D. Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Venezuela

1. Hubungan Diplomatik Tiongkok dengan Venezuela

Secara formal hubungan diplomatik antara Venezuela dengan RRT telah terjalin sejak tahun 1974. Venezuela merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Hubungan keduanya setelah 1999 dapat dikategorikan lancar, mulai dari peningkatan pertemuan tingkat tinggi, hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang tetap, dan meningkatnya pertukaran bidang budaya, pendidikan, sains, dan

teknologi. Walaupun terdapat pertemuan tingkat tinggi sering dilakukan, tercatat hanya terdapat lima kunjungan selama kurun waktu tahun 1974 hingga tahun 2000 (Eberling, 2017).

Keduanya tidak terlalu memiliki hubungan diplomatik yang erat hingga saat kedatangan Presiden Hugo Chavez ke Tiongkok pada tahun 1999. Pada tahun 1999 hubungan bilateral antara Tiongkok dan Venezuela berada pada ranah baru. Hal ini ditandai dengan intensitas dialog bilateral dan bertukar kunjungan resmi tingkat tinggi, diantaranya yaitu empat kunjungan kenegaraan Presiden Hugo Chavez ke Tiongkok pada tahun 1999, 2001, dan 2006. Kemudian dibalas kunjungan ke Venezuela oleh mantan Presiden Tiongkok Jiang Zemin pada tahun 2001, mantan Wakil Presiden Zeng Qinghong pada tahun 2005, Li Changchun, anggota Komite Tetap Biro Politik Partai Komunis Tiongkok, pada 2007 dan baru-baru ini, kunjungan Wakil Perdana Menteri Hui Liangyu, di bulan Mei 2008.

Hasil konkret dari timbal balik kunjungan resmi tingkat tinggi dan dialog diatas ialah ditandainya 255 perjanjian dalam hal perdagangan dan 75 persen di antaranya ditandatangani selama pemerintahan Presiden Chavez. Dari perjanjian ini, 79 mega proyek sedang dikembangkan, beberapa dianggap strategis. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terkenal secara internasional berpartisipasi dengan pemerintah Venezuela dalam proyek-proyek ini, yang mencakup semua bidang kerja sama yang mungkin antara kedua negara. Pada saat yang sama, kerja sama dalam budaya, pendidikan, dan olahraga juga telah tumbuh pesat dan kesepakatan baru dibuat untuk penyelesaian masalah sosial yang akan memungkinkan Venezuela mendapat manfaat dari pengalaman Tiongkok dalam memerangi kemiskinan (Ji, 2007).

Dalam hubungan diplomatik politik, beberapa perjanjian telah ditanda-tangani antara kedua negara termasuk *Agreement of Mutual Exemption of Entry Visas between People's Republic of China and Government of Venezuela on Holders of Diplomatic and Service Passports/ Perjanjian Pengecualian Bersama Visa Masuk* antara Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Venezuela tentang Pemegang Paspor Layanan dan Diplomatik di tahun 1989. Kemudian tahun 1991 penandatanganan *Memorandum of Understanding of Consultative Mechanism between Foreign Ministry of the People's Republic of China and Republic of Venezuela*. Pada tahun 1999 perjanjian untuk perluasan distrik konsuler dari Hongkong ke Makau (Eberling, 2017).

Kemudian Perjanjian Pengecualian Bersama Visa Masuk antara Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Venezuela tentang Pemegang Diplomatik, Paspor Layanan dan Paspor untuk Urusan Publik dan *Joint Statement on Establishing Comprehensive Strategic Partnership* di tahun 2014 ketika Presiden Xi Jinping berkunjung ke Karakas (Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2014).

Di bidang lain yaitu budaya, pendidikan, dan olahraga Tiongkok baru saja meratifikasi perjanjian baru. Perjanjian terbaru ini termasuk kedalam China-CELAC Cooperation Plan 2015, dimana Venezuela juga termasuk kedalam kerjasama China-CELAC Forum. Dalam perjanjian tersebut salah satunya *China-LAC Young Political Leaders' Forum* yang merupakan program lanjutan era Presiden Hu Jintao yang merekrut 30 wakil muda dari beberapa negara LAC termasuk Venezuela, dan di tahun 2013 dihadiri oleh 50 wakil setiap negara LAC (Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2018).

Latar belakang hubungan antara Tiongkok dan Venezuela terjalin karena Tiongkok memiliki prinsip non interverensi dalam urusan dalam negeri dalam hubungan internasionalnya. Prinsip ini juga mendapatkan banyak pujian dari negara-negara lain, terlebih negara-negara berkembang yang anti-kapitalisme (Ríos, 2013). Motivasi lain Tiongkok untuk meningkatkan bekerja sama dengan Venezuela karena adanya dorongan secara ekonomi dan pemikiran pragmatis. Akan tetapi semua berawal dari tujuan politik Tiongkok kala itu untuk mendukung kebijakan Tiongkok satu arah/ *One's China-Policy*. Sedangkan Venezuela melihat jika hubungannya dengan Tiongkok dapat mengurangi tensi Washington di Amerika Latin dan juga sebagai partner dalam mendapatkan posisi atau suara dalam organisasi internasional (Eberling, 2017).

2. Hubungan Ekonomi Tiongkok dengan Venezuela

Dilihat dari hubungan bilateral Tiongkok dengan Venezuela yang terjalin sejak 1974, lalu sempat stagnan lantaran tidak ada hubungan bilateral yang terjadi. Ditahun 1996 Perdana Menteri Li Peng berkunjung ke Venezuela untuk melakukan negosiasi lanjut terkait hubungan bilateral keduanya. Tak lama setelah kunjungan Perdana Menteri Li Peng pada tahun 1996 dan bahkan tanpa Chavez dalam kepresidenan Venezuela, pada Juni 1997 Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional Tiongkok (*China National Petroleum Corporation/CNPC*) memenangkan tender internasional untuk mendapatkan hak memanen di dua ladang minyak tua di Venezuela, bernilai US \$ 358 juta dolar (Xinhua News Agency, 2009).

Produksi dimulai pada tahun berikutnya. Saat itu proyek investasi Tiongkok terbesar di Amerika

Latin. Hingga akhir 1999, total volume investasi berjumlah sekitar US \$ 400 juta dolar dan 11 perusahaan yang didanai Tiongkok didirikan di Venezuela. Pada waktu itu Venezuela belum menyatakan minatnya pada pasokan minyak ke Tiongkok dengan alasan bahwa lokasinya tidak menguntungkan karena letaknya yang terpencil (Ríos, 2013).

Pada tahun 2001, kedua negara sepakat untuk mendirikan Komisi Tingkat Venezuela-Tiongkok/*China-Venezuela High Level Joint Commission Agrees* yang bertujuan untuk memantau kerjasama yang dan bertanggung jawab atas tindak lanjut proyek-proyek kerjasama. Komisi ini dipimpin oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Venezuela dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok. *The Strategic Alliance for Joint Development*/Aliansi Strategis untuk Pengembangan Bersama yang memandu kerja sama antara Venezuela dan Tiongkok dimulai pada tahun 2001 dan berfokus pada dua masalah mendasar yaitu energi dan pertanian. Sejak saat itu kerjasama telah berkembang menjadi lebih kompleks dan beragam. Aliansi strategis itu mencakup beberapa proyek penting di bidang pertanian, seperti pembangunan sistem irigasi nasional di Venezuela dan proyek-proyek untuk memperkuat industri agro. Kedua negara juga menciptakan hubungan yang mengikat antara perusahaan di sektor energi (PDVSA.COM, 31).

Pada tahun 2005, Tiongkok memberikan \$ 5 miliar kepada Brasil untuk proyek-proyek infrastruktur termasuk jalur kereta api dan fasilitas pelabuhan. Tahun itu Tiongkok juga menjanjikan dana ke Venezuela untuk infrastruktur energi, pengembangan pertanian, dan telekomunikasi. Meskipun pendanaan itu dapat diberi label investasi Tiongkok, dan mungkin harus diberikan

sumbernya, itu tidak berbeda dengan bantuan asing Tiongkok dalam banyak hal (Copper, 2016).

Sebaliknya untuk memperluas bisnis di Tiongkok, PDVSA mendirikan kantor cabang di Beijing pada hari Senin. Wilayah Zumano memiliki 400 juta barel minyak mentah ringan dan sedang dan cadangan gas 4 miliar kaki kubik, kata PDVSA. Venezuela berencana untuk menghabiskan US \$ 56 miliar dari 2006 hingga 2012 untuk menggandakan produksi minyaknya menjadi 5,1 juta barel per hari dari saat ini 2,6 juta barel per hari. Tiongkok tahun lalu menghasilkan sekitar 1,27 miliar barel minyak, dan mengimpor 898 juta barel. Venezuela mengatakan pekan lalu bahwa mereka mengharapkan untuk mengekspor 300.000 barel minyak mentah per hari ke Tiongkok pada 2012 dari level saat ini 68.800 barel per hari (Ying, 2008).

Pada bulan September 2009 telah diumumkan kesepakatan antara kedua negara untuk mengekstraksi sekitar 450.000 barel per hari minyak mentah ekstra berat di sabuk minyak Orinoco yang mana daerah ini merupakan cadangan energi utama wilayah Amerika Latin. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan Tiongkok sebesar 16 juta dollar amerika ditambah dari Rusia sebesar 20.000 juta dolar amerika di wilayah tersebut. Tiongkok juga membangun anjungan pengeboran dan minyak, rel kereta api, dan perumahan (Ríos, 2013).

Setelah Presiden Nicholas Maduro mengambil alih kepemimpinan tahun 2013, terdapat 12 perjanjian bilateral baru yang ditanda-tangani terkait bidang energi, infrastruktur, sains, dan teknologi. Dalam hal menegosiasikan hubungan bilateral yang signifikan, perusahaan minyak Tiongkok Sinopec telah menyetujui investasi sebesar 14 miliar dollar amerika untuk

menghasilkan minyak di Sabuk Minyak Orinoco Venezuela bersama dengan Perusahaan Minyak Venezuela PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A). Selain itu, China Development Bank juga setuju untuk memberikan bantuan 5 miliar dollar amerika untuk reformasi sosial di Venezuela dan 700 juta dollar amerika diberikan untuk mengembangkan sektor pertambangan Venezuela agar dapat mengembalikan dana berupa minyak atau biasa disebut sebagai *loan for oil*. Dan yang terakhir, *China's Export-Import Bank* menyetujui untuk mendanai perkembangan pembangunan pelabuhan di Pequiven, Venezuela yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan memasarkan produk petrokimia untuk pasar nasional dan internasional sebesar 391 juta dollar amerika (Eberling, 2017).

Tiongkok merupakan mitra dagang kedua Venezuela setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2016, perdagangan Tiongkok-Venezuela berjumlah \$ 7,42 miliar dolar, dengan \$ 4,9 miliar dolar berasal dari ekspor Venezuela dan \$ 2,52 miliar berasal dari ekspor Tiongkok (Simoës, 2017).

Tabel 2.1 China Export to Venezuela

| Year | Product | | | | |
|------|-------------------|----------|---------|----------------------|----------|
| | Chemical Products | Machines | Metals | Plastics and Rubbers | Textiles |
| 2013 | \$352M | \$2.41 B | \$1.43B | \$363M | \$412M |
| 2014 | \$211M | \$2.68B | \$707M | \$230M | \$300M |
| 2015 | \$187M | \$2.51B | \$749M | \$146M | \$329M |
| | | | | | |
| 2016 | \$218M | \$883M | \$339M | \$130M | \$138M |
| 2017 | \$ 141M | \$575M | \$243M | \$116M | \$137M |

Sumber: OEC, What does Venezuela import from China? (2013-2017) (OEC, 2017)